



**CaLK
2026
401912**

SEMESTER I

**PENGADILAN NEGERI Koba
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CaLK**

Semester I

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026
Tingkat Satuan Kerja (SATKER)**



(005.01.401912)

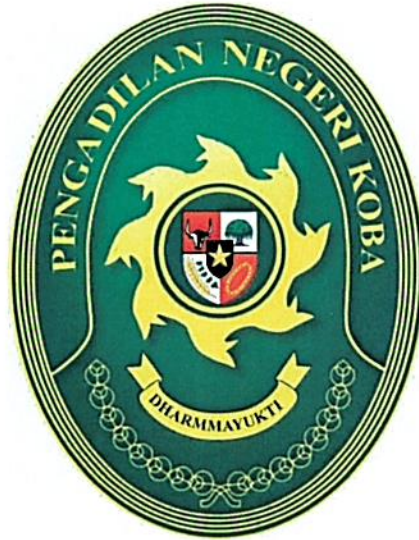
**Jl. Gelora No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, Padang Mulia, Koba
Bangka Tengah -Bangka Belitung 33681**

Telp / Fax. (0718)6911210

website :www.pn-koba.go.id

Email : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI Koba**



**Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2026**

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Gelora No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah, Padang Mulia, Koba
Bangka Tengah -Bangka Belitung 33681**

Telp / Fax. (0718)6911211

e-mail : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 30 Juni 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Koba adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Koba. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Koba, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



IRHANSYAH, S.Kom
NIP. 198004172009121003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum.....	10
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Koba.....	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	14
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	14
Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar.....	26
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	33
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	35
D.2. Beban Pegawai.....	36
D.3. Beban Persediaan	37
D.4. Beban Barang dan Jasa	37
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6. Beban Perjalanan Dinas	38

D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8.	Kegiatan Non Operasional	39
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	40

PENGADILAN NEGERI KOBAB

Jl. GELORA NO.1 KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANGKA TENGAH

KEL. PADANG MULIA KEC. KOBAB KABUPATEN BANGKA TENGAH

Telp / Fax. (0718)6911210 - website :www.pn-koba.go.id

Email : pengadilan.negeri.koba@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Koba, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



IRHANSYAH, S.Kom
NIP. 198004172009121003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2026 per 30 Juni 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.7.321.477.363,- atau mencapai 60,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.12.102.945.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Dana Per 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp.20.739.647.788,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.52.875.900,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.20.686.771.888. Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.653.201.137,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.653.201.137,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.653.201.137,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.20.086.446.651,- yang terdiri dari Ekuitas dan Kewajiban sebesar Rp.20.739.647.788,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.7.275.059.118,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.7.275.059.118,-), sedangkan Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. (0) dan surplus (defisit) sebesar (Rp.7.275.059.118,-), sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp.7.275.059.118,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.20.040.028.437,- ditambah surplus/Defisit-LO sebesar (Rp.7.275.059.118,-). Kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.7.321.477.332,- Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp.20.086.446.651,- mengalami kenaikan Ekuitas Rp.46.418.214,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI KOBAB LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	0	0
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	10.111.687.000	6.270.419.291	62,01	1.693.978.111
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.885.058.000	944.863.038	50,08	562.226.303
3.	Belanja Modal	B.2.3.	106.200.000	106.200.000	100	0
	Jumlah Belanja Negara		12.102.945.000	7.321.477.332	60,49	2.256.204.414

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

PENGADILAN NEGERI Koba NERACA PER 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	28.875.900	9.246.200
Jumlah Aset Lancar		52.875.900	20.069.800
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	354.000.000	354.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.567.739.583	4.394.167.580
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	22.259.906.979	22.259.906.979
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	190.000	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(6.495.064.674)	(5.362.668.023)
Jumlah Aset Tetap		20.686.771.888	21.645.596.536
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	C.3. 2.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		20.739.647.788	21.674.842.736
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	629.201.137	243.711.878
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	0	1.405.000
Uang Muka Dari KPPN	C.4. 3.	24.000.000	20.000.000
Jumlah Kewajiban		653.201.137	265.116.878
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	20.086.446.651	21.409.725.858
Jumlah Ekuitas		20.086.446.651	21.409.725.858
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20.739.647.788	21.674.842.736

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI Koba LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	D.1.1.1	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.1.1.2	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	D.1.1.3	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	D.1.1.4	0	0
Pendapatan Cukai	D.1.1.5	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	D.1.1.6	0	0
Pendapatan Bea Masuk	D.1.1.7	0	0
Pendapatan Bea Keluar	D.1.1.8	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.2	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.2.1	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	D.1.2.2	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2.3	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		0	0
PENDAPATAN HIBAH	D.1.3		
Pendapatan Hibah	D.1.3.1	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0

BEBAN OPERASIONAL		D. 2		
Beban Pegawai	D.2 .1		5.797.092.817	1.905.617.989
Beban Persediaan	D.2 .2		7.307.000	10.174.000
Beban Barang dan Jasa	D.2 .3		502.829.688	349.764.621
Beban Pemeliharaan	D.2 .4		391.730.489	208.108.320
Beban Perjalanan Dinas	D.2 .5		15.919.910	24.115.535
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2 .6		0	0
Beban Bunga	D.2 .7		0	0
Beban Subsidi	D.2 .8		0	0
Beban Hibah	D.2 .9		0	0
Beban Bantuan Sosial	D.2 .10		0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2 .11		560.179.214	571.304.694
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2 .12		0	0
Beban Transfer	D.2 .13		0	0
Beban Lain-lain	D.2 .14		0	0
JUMLAH BEBAN			7.275.059.118	3.069.085.159
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(7.275.059.118)	(3.069.085.159)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3 .1			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3 .1.1		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3 .1.2		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.3 .2			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3 .2.1		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3 .2.2		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.3 .3		0	0

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	.3.1	0	5
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	.3.2	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			0	0
POS LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA	D.4		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			(7.275.059.118)	(3.069.085.159)
SURPLUS (DEFISIT) - LAPORAN OPERASIONAL			(7.275.059.118)	(3.069.085.159)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI KOB
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E. 1	20.040.028.437	22.222.606.603
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.275.059.118)	(3.096.085.159)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 4	0)	0)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.4	0)	0
Koreksi Lain-lain	E. 4.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	7.321.477.332	2.256.204.414
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 6	46.418.214	(812.880.745)
Ekuitas Akhir		20.086.446.651	21.409.725.858

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/30 Juni 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Koba

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Koba sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Negeri Koba adalah “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI Koba YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Koba adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Koba Yang Agung;
2. Memberikan Pelayanan Hukum kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Koba;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Koba

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Koba melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I 30 Juni Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I 30 Juni Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Koba adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Dalam Negeri	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2026 tidak mengaamai perubahan dibandingkan 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan karena :

1. Tidak ada aktivitas jasa sewa rumah dinas.

Perbandingan Realisasi PNPB TA 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Dalam Negeri	0	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0	0

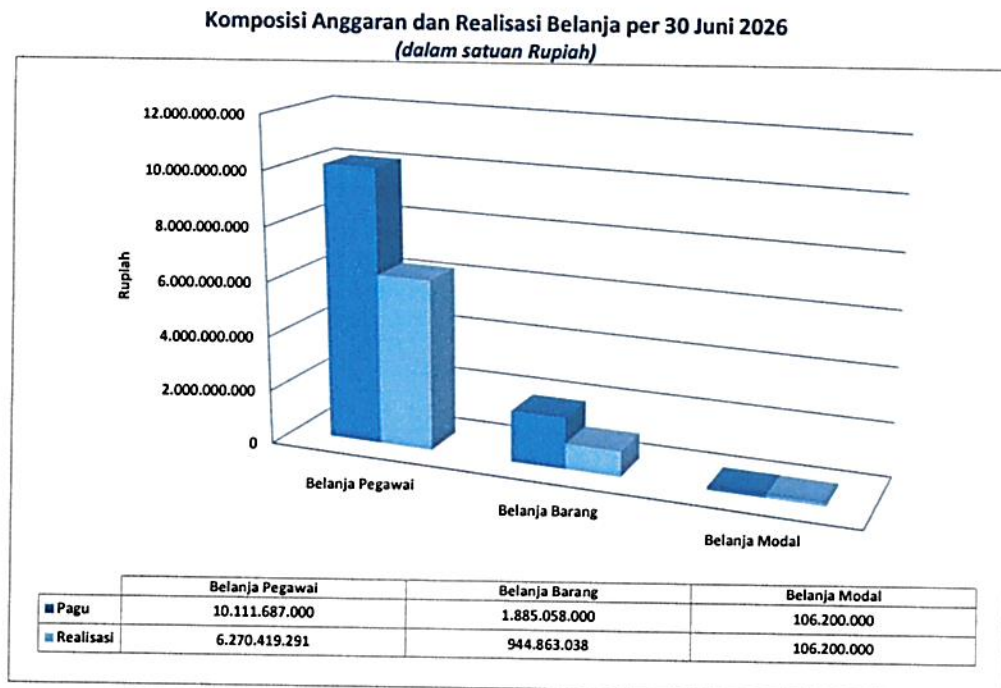
B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.7.321.477.332,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 60,49 % dari anggaran senilai Rp.12.102.945.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 30 Juni 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10.111.687.000	6.270.419.291	62,01
Belanja Barang	1.885.058.000	944.863.038	50,08
Belanja Modal	106.200.000	106.200.000	100
Total Belanja Bruto	12.102.945.000	7.321.477.332	60,49
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	12.102.945.000	7.321.477.332	60,49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIPA) 30 Juni 2025 & 30 Juni 2024

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar **Rp.5.065.272.918,-** atau sebesar 324,50 persen dari realisasi tahun lalu pada periode 30 Juni 2025 dan Kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran dan adanya kenaikan pada belanja pegawai pada pengadilan Negeri Koba. Perbandingan realisasi belanja TA 30 Juni 2026 dan Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per TA 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	6.270.419.291	1.693.978.111	4.577.041.180	270,19
Belanja Barang	944.863.038	562.226.303	382.636.735	68,05
Belanja Modal	106.200.000	0		
Total Belanja	7.321.477.332	2.256.204.414	5.065.272.918	324,50

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.6.270.419.291,- dan Rp. 1.693.978.111,- Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2026 mengalami Kenaikan sebesar Rp.4.576.441.180 atau 270,16 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 30 Juni 2025. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per TA 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	660.111.000	594.566.700	65.544.300	11,02
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.205	7.610	1.595	20,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44.531.020	34.624.180	9.906.840	28,61
Beban Tunj. Anak PNS	13.126.608	9.525.740	3.600.868	37,80
Beban Tunj. Struktural PNS	16.080.000	15.540.000	540.000	3,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	21.880.000	104.280.000	(82.400.000)	(79,01)
Beban Tunj. PPh PNS	3.494.299	15.122.226	(11.627.927)	(76,89)
Beban Tunj. Beras PNS	35.123.700	28.461.060	6.662.640	23,40
Beban Uang Makan PNS	74.859.000	60.630.000	14.229.000	23,46
Beban Tunjangan Umum PNS	5.840.000	6.390.000	(550.000)	(8,60)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	64.800.000	45.900.000	18.900.000	41,17
Beban Tunjangan PPH Pejabat Negara	1.065.711.072	120.430.595	945.280.477	784,91
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4.094.200.000	658.500.000	3.435.700.000	521,74
Belanja Gaji Pokok PPPK	124.303.425	0	124.303.425	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.915	0	2.915	0
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.286.894	0	8.286.894	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.385.714	0	2.385.714	0
Belanja Tunjangan Beras	8.400.720	0	8.400.720	0

PPPK				
Belanja Uang Makan PPPK	19.335.000	0	19.335.000	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.938.750	0	7.938.750	0
Total Belanja Bruto	6.270.419.322	1.693.978.183	4.576.441.139	270,15
Pengembalian Belanja	31	72	(41)	(56,95)
Total Belanja Netto	6.270.419.291	1.693.978.111	4.576.441.180	270,16

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 562.226.303 dan Rp. 443.830.630 Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 118.395.673 atau 26,675 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 30 Juni 2024. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan TA 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2025	TA 30 Juni 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	360.781.369	290.634.577	70.146.792	24,13
Belanja Barang Non Operasional	1.740.000	821.000	919.000	111,93
Belanja Barang Persediaan	22.758.800	19.302.800	3.456.000	17,90
Belanja Jasa	154.898.170	25.341.071	129.557.099	511,25
Belanja Pemeliharaan	388.764.789	202.011.420	186.753.369	92,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	15.919.910	24.115.535	(8.195.625)	(33,99)
Total Belanja Bruto	944.863.038	562.226.303	382.636.735	68,06
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	944.863.038	562.226.303	382.636.735	68,06

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.106.195.003,- dan Rp.0 Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025 mengalami perubahan atau 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 30 Juni 2025. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2025	TA 30 Juni 2024	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	106.195.003	0	106.195.003	100
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	106.195.003	0	106.195.003	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.52.875.900,- dan Rp.29.246.200,- Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025
	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
	Belanja Dibayar di Muka	0	3.680.000
	Persediaan	28.875.900	16.389.800
	Total Aset Lancar	52.875.900	20.069.800

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah Rp.24.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
	Jumlah	24.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025
1.	Belanja dibayar dimuka	0	3,680,000
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.28.875.900,- dan Rp.16.389.800,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No.	Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	28.875.900	16.389.800
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0

8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	28.875.900	16.389.800

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji sebesar Rp.22.788.205.952,- dan Rp.22.788.205.952,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 6 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Perubahan
1	Tanah	354.000.000	354.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.567.739.583	4.394.167.580	173.572.003
3	Gedung dan Bangunan	22.259.906.979	22.259.906.979	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0
	Akumulasi Penyusutan	(6.495.064.674)	(5.362.668.023)	(571.304.694)
	Nilai Buku Aset Tetap	20.686.771.888	21.645.596.536	(571.304.694)

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 354.000.000 dan Rp. 354.000.000. Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	2010104001.1	7.375	HAK PAKAI No. 00066	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Gedung Kantor	354.000.000

Jumlah					354.000.000
--------	--	--	--	--	-------------

Pada Tahun Anggaran 30 Juni 2026 ini tidak terdapat perubahan pada nilai aset tetap berupa tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.4.567.739.583,- dan Rp. 4.394.167.580,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	
Mutasi Tambah	173.572.003
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	4.567.739.583
Akumulasi Penambahan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	4.567.739.583

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 22.259.906.979 dan Rp. 22.259.906.979,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	22.259.906.979
Mutasi Tambah	0
Koreksi Pencatatan (Revaluasi BMN)	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	22.259.906.979
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	22.259.906.979

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan (Revaluasi BMN)	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.190.000 dan Rp.190.000.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	190.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2026	190.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	190.000

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Saldo per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	0
Nilai Buku 30 Juni 2026 30 Juni 2025	0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp.(6.495.064.674,-) dan Rp.(5.362.668.023,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.190.000 dan Rp.190.000 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

C.3.1. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Kobaserta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.653.201.137,- dan Rp.265.116.878,-

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2025	TA 30 Juni 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	629.201.137	243.711.878
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	1.405.000
Uang Muka dari KPPN	24.000.000	20.000.000
Jumlah	653.201.137	265.116.878

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 243.711.878,- Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang kepada Pihak Ketiga, yaitu Kekurangan Uang Makan Pegawai Pengadilan Negeri Koba Bulan Juni yang pembayarannya dibebankan atau diakrualkan ke TA 30 Juni 2026.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 September 2025
Utang kepada Pihak Ketiga	0	243.711.878
Jumlah	0	243.711.878

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 20.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah Akun Pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada dikelompokkan ke dalam Akun Aset Lancar. Rincian Uang Muka dari KPPN pada Pengadilan Negeri Koba per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025
Uang Muka dari KPPN	24.000.000	20.000.000
Jumlah	24.000.000	20.000.000

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan Dalam Negeri	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	Total Pendapatan	0	0	0

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 5.797.092.817,- dan Rp.1.693.978.111,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per TA 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	660.111.000	594.566.700	65.544.300	11,02
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.205	7.610	1.595	20,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44.531.020	34.624.180	9.906.840	28,61
Beban Tunj. Anak PNS	13.126.608	9.525.740	3.600.868	37,80
Beban Tunj. Struktural PNS	16.080.000	15.540.000	540.000	3,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	21.880.000	104.280.000	(82.400.000)	(79,01)
Beban Tunj. PPh PNS	3.494.299	15.122.226	(11.627.927)	(76,89)
Beban Tunj. Beras PNS	35.123.700	28.461.060	6.662.640	23,40
Beban Uang Makan PNS	74.859.000	60.630.000	14.229.000	23,46
Beban Tunjangan Umum PNS	5.840.000	6.390.000	(550.000)	(8,60)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	64.800.000	45.900.000	18.900.000	41,17
Beban Tunjangan PPH Pejabat Negara	1.065.711.072	120.430.595	945.280.477	784,91
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	4.094.200.000	658.500.000	3.435.700.000	521,74

Belanja Gaji Pokok PPPK	124.303.425	0	124.303.425	0
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.915	0	2.915	0
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	8.286.894	0	8.286.894	0
Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.385.714	0	2.385.714	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.400.720	0	8.400.720	0
Belanja Uang Makan PPPK	19.335.000	0	19.335.000	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.938.750	0	7.938.750	0
Total Belanja Bruto	6.270.419.322	1.693.978.183	4.576.441.139	270,15
Pengembalian Belanja	31	72	(41)	(56,95)
Total Belanja Netto	6.270.419.291	1.693.978.111	4.576.441.180	270,16

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.7.307.000,- dan Rp.10.174.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	7.307.000	10.174.000	3.402.800	21,401
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	19.302.800	15.900.000	3.402.800	21,401

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.502.829.688,- dan Rp.349.764.621,- Beban Jasa adalah konsumsi

atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	342.059.369	304.815.477	37.243.892	12,21
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.278.000	1.166.000	112.000	9,60
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14.300.000	16.350.000	(2.050.000)	(12,53)
Beban Barang Operasional Lainnya	3.144.000	375.000	2.769.000	738,4
Beban Bahan	300.000	256.000	44.000	17,18
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.440.000	565.000	875.000	154,86
Beban Langganan Listrik	87.132.319	0	87.132.319	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.646.000	2.661.071	(1.015.071)	(38,14)
Beban Sewa	51.530.000	23.576.073	27.953.927	118,56
Total Beban Barang dan Jasa	502.829.688	349.764.621	153.065.067	43,762

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.388.764.789,- dan Rp.202.011.420,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2025	TA 30 Juni 2024	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	320.688.117	151.448.420	169.239.697	111,74
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.076.672	50.563.000	17.513.672	34,63

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	388.764.789	202.011.420	186.753.369	92,44

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.15.919.910,- dan Rp.24.115.535,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	15.919.910	24.115.535	(8.195.625)	(33,98)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	15.919.910	24.115.535	(8.195.625)	(33,98)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 560.179.214,- dan Rp. 571.304.694,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2026	TA 30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	337.580.144	348.705.624	(11.125.480)	(3,19)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	222.599.070	222.599.070	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	560.179.214	571.304.694	(11.125.480)	(1,947)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2026 dan TA 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 30 Juni 2025	TA 30 Juni 2024	Naik(Turun)	%
Surplus / defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Jumlah Netto (pendapatan – beban)	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada periode ini.

F.2.2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Perpres RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) DIPA Badan Urusan Administrasi (01).

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Koba adalah : 1. Bank BRI Cabang Koba A/C 006301000032304 a.n. BPg 015 PN Koba-01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Negeri Koba telah melakukan 6 kali revisi DIPA yaitu :

- Revisi I tanggal 25 Desember 2025 yaitu Revisi DIT PA, Direktif presiden
- Revisi II tanggal 02 Januari 2026 yaitu Revisi DIT PA
- Revisi III tanggal 18 Februari 2026 yaitu Revisi Hal 3 DIPA, Revisi POK
- Revisi IV tanggal 09 April 2026 yaitu tentang Revisi DIT PA, penambahan Pagu 51
- Revisi V tanggal 16 April 2026 yaitu tentang Revisi Hal 3 DIPA, Revisi POK
- Revisi VI tanggal 17 Juni 2026 yaitu tentang Revisi DIT PA, ABT 51 dan 52

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama periode 30 Juni 2026 Pengadilan Negeri Koba tidak ada melakukan ralat SPM, SSBP, dan SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Penunjukan Pejabat PPK, PPSPM dan Staf Pengelola Anggaran pada satker 005.01.401912 sesuai dengan SK KPA Nomor: 1994/SEK.PN.W7-U4/KU1.1.2/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025;
- Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satker 005.01.401912 sesuai dengan SK KPA Nomor: 0011/SEK.PN.W7-U4/KU1.1.2/I/2026 tanggal 2 Januari 2026.
- Besaran Honorarium KPA, PPK, PPSPM dan Staf Pengelola Anggaran pada satker 005.01.401912 sesuai dengan SK KPA Nomor: 0014/SEK.PN.W7-U4/KU1.1.2/I/2026 tanggal 2 Januari 2026.

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2026

Periode s.d bulan : 2026-06

Kementerian Negara/Lembaga : 005 - MAHKAMAH AGUNG

Eselon 1 : 005.01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Wilayah/Provinsi : 30.04 - KAB. BANGKA TENGAH/KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Satuan Kerja : 401912 - PENGADILAN NEGERI KOB

Halaman : 1

Tanggal Cetak : 30-07-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	12,102,945,000.00	7,321,477,363.00	60.49%							
04	PERADILAN	12,102,945,000.00	7,321,477,363.00	60.49%							
WA	Program Dukungan Manajemen	12,102,945,000.00	7,321,477,363.00	60.49%							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	106,200,000.00	106,195,003.00	100%							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	106,200,000.00	106,195,003.00	100%							
951	Layanan Sarana Internal	106,200,000.00	106,195,003.00	100%	4.0000	Unit	4.0000	100%	0%	(00)	Capaian Kinerja (Caput) sudah tercapai 100% pada bulan April 2026
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	11,996,745,000.00	7,215,282,360.00	60.14%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,996,445,000.00	7,214,982,360.00	60.14%							
962	Layanan Umum	1,440,000.00	1,440,000.00	100%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0%	(00)	Capaian Kinerja (Caput) sudah tercapai 100% pada bulan April 2026
994	Layanan Perkantoran	11,995,005,000.00	7,213,542,360.00	60.14%	1.0000	Layanan	0.0000	60.14%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000.00	300,000.00	100%							
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000.00	300,000.00	100%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	0%	(00)	Capaian Kinerja (Caput) sudah tercapai 100% pada bulan April 2026

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TA 2026

Kode dan Nama UAKPA : (401912) Pengadilan Negeri Koba
 Kode dan Nama UAPPAW : (3000) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 Kode dan Nama Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. Face LRA, Neraca, LO, dan LPE	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		√	Tidak Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3. Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		√	Tidak

2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A	N/A	Ya
3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi <i>Approve</i> per tanggal pelaporan		√	Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum <i>Approve</i> per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		√	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		√	Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?		√	Tidak
i. Pagu/DIPA		√	Tidak
ii. Estimasi PNPB		√	Tidak
iii. Belanja		√	Tidak
iv. Pengembalian Belanja		√	Tidak
v. Pendapatan		√	Tidak
vi. Pengembalian Pendapatan		√	Tidak
vii. Kas BLU		√	Tidak
viii. Kas Di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
ix. Kas Hibah		√	Tidak
x. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
Daftar MonSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak

3. Adakah Neraca Tidak <i>Balance</i> ?		√	Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	N/A	N/A	Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak

13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)?	N/A	N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya

Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI		√	
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		√	
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	N/A	N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk	N/A	N/A	
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah.		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA			
Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 2025 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A	Ya
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8. Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban		√	Tidak

transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN			
3. Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak

- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2. Apakah ada Beban Bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya

6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?	N/A	N/A	Ya
LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?	N/A	N/A	Ya
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL	Koba, 30 Juni 2026 Penelaah		
			
Nofriandi Pratama NIP. 199011292025211039	Oskar Syaifullah, S. Kom NIP.198610122011011014		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (30.04) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BANGKA TENGAH
 Satuan Kerja : (401912) PENGADILAN NEGERI KOBA
 Tgl, No. SP DIPA : 01 Desember 2025 , DIPA-005.01.2.401912/2026
 Tahun Anggaran : 2026
 KPPN : (015) Pangkal Pinang
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
		(+)
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
		(-)
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
		(+)
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
		(-)
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



IRHANSYAH, S.Kom.
NIP. 198004172009121003

KAB. BANGKA TENGAH , 07 Juli 2026

Bendahara Penerimaan



MERI KARTIKA SARI
NIP. 198703032022032001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal,07 Juli 2026

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Juni 2026

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBPN	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	0,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	0,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	0,00
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00-

Bendahara Penerimaan



MERI KARTIKA SARI
NIP. 198703032022032001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



IRHANSYAH, S.Kom.
NIP. 198004172009121003

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 401912 (PENGADILAN NEGERI KOBAB)

BULAN : JUNI 2026

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan,



MERI KARTIKA SARI

NIP. 198703032022032001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-005.01.2.401912/2026

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (30.04) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BANGKA TENGAH

KPPN : (015) Pangkal Pinang

Satuan Kerja : (401912) PENGADILAN NEGERI KOBA

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 24.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00026/SSP/401912/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	24.000.000,00	72.238.834,00	72.238.834,00	24.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	24.000.000,00	72.238.834,00	72.238.834,00	24.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	24.000.000,00	26.337.167,00	26.337.167,00	24.000.000,00
	1. BP UP*)	24.000.000,00	20.303.167,00	20.303.167,00	24.000.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	24.000.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	24.000.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	24.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	24.000.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	24.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	24.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	24.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

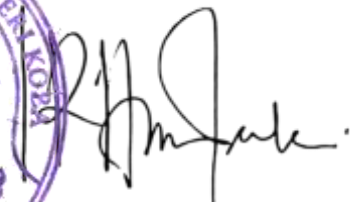
C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



IRHANSYAH, S.Kom.
NIP. 198004172009121003

KAB. BANGKA TENGAH, 30 Juni 2026

Bendahara Pengeluaran



EKO ARFANDI, S.H.
NIP. 198404082009121009

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653244019121000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 24.000.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00026/SSP/401912/2026

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	24.000.000,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	24.000.000,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	24.000.000,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	24.000.000,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	24.000.000,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	24.000.000,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	24.000.000,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	24.000.000,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00

4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	24.000.000,00
---	-------------------	-----	---------------

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	24.000.000,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	24.000.000,00

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

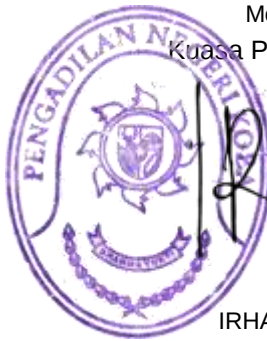
D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



EKO ARFANDI, S.H.
NIP. 198404082009121009



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

IRHANSYAH, S.Kom.
NIP. 198004172009121003

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 401912

BULAN : JUNI 2026

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	653244019121000	BPG 015 PN KOB A 401912	BRI CABANG PEMBANTU KOB A	20	S- 2732/WPB.12/KP. 06/2020	16-10-2020	2026-06-29	0.00



BENDAHARA PENGELUARAN

EKO ARFANDI, S.H.

NIP. 198404082009121009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2026

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Propinsi / Kabupaten / Kota : (30.04) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BANGKA TENGAH
Satuan Kerja : (401912) PENGADILAN NEGERI KOB40191200-
No Rekening : 653244019121000
Nama Rekening : BPG 015 PN KOB4 401912
Nama Bank : BRI CABANG PEMBANTU KOB4
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2026			22.866.500,00
03-06-2026	FPK-PENG- pcrftMdPpM4oP21	[DARI TUNAI] PENARIKAN UANG PERSEDIAAN DIPA 401912 UNTUK BELANJA BARANG	0,00	22.866.500,00	0,00
04-06-2026	FPK-PENG- 5OV46vRco9Z5Hlq	HONOR DIPA BULAN MEI 2026	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
05-06-2026	FPK-PENG- 1czcg2J7S0hiPMn	[DARI TUNAI] PENARIKAN HONOR DIPA BULAN MEI 2026	0,00	2.732.000,00	0,00
17-06-2026	FPK-PENG- 5oBNaXhLZ06TQCC	UANG TRANSPORT HAKIM BULAN MEI 2026	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
26-06-2026	FPK-PENG- HtTUjmf0UE3rixg	Transfer Uang Transport Hakim Bulan Mei 2026	0,00	3.240.000,00	0,00
29-06-2026	FPK-PENG- OI0e6Hh4SbY50I2	UANG PERSEDIAAN DIPA 401912	20.303.167,00	0,00	20.303.167,00
29-06-2026	FPK-PENG- 6uo1c6faU7RSNw3	[DARI TUNAI] PENARIKAN UANG PERSEDIAAN DIPA 401912	0,00	20.303.167,00	0,00
Jumlah			26.275.167,00	49.141.667,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

EKO ARFANDI, S.H.

NIP. 198404082009121009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

Dicetak pada tanggal, 01 Juli 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Pangkal Pinang - 015

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak PENGADILAN NEGERI Koba (401912)

Cetak Tanggal 01-07-2026

Periode : 2026-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	015	409825	08-Jun-26	PENGADILAN NEGERI Koba BADAN URUSAN ADMINISTRASI M 0001140250315000	9014C684PQ8GVOKA 947415133348	411618	IDR	24,000	ADA
2	015	409825	30-Jun-26	PENGADILAN NEGERI Koba BADAN URUSAN ADMINISTRASI M 0001140250315000	872E274IAEST9TDM 922692143956	411618	IDR	38,000	ADA
TOTAL								62,000	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198404082009121009 pada 01-07-
2026 16:14:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Pangkal Pinang - 015

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBPN PENGADILAN NEGERI KOB (401912)

Cetak Tanggal 01-07-2026

Periode : 2026-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198404082009121009 pada 01-07-
2026 16:14:24 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Pangkal Pinang - 015

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja PENGADILAN NEGERI Koba (401912)

Cetak Tanggal 01-07-2026

Periode : 2026-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198404082009121009 pada 01-07-
2026 16:14:24 WIB.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI Koba

Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba,
Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
REVISI ANGGARAN PADA PENGADILAN NEGERI Koba TAHUN ANGGARAN 2026

DIPA 01 (401912)

NO.	REVISI	DS DIPA	TANGGAL SAH REVISI	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	KETERANGAN
1.	AWAL	5855-3855-7834-5922	24 Nov 2025	6.002.690.000	-	DIPA AWAL
2.	REVISI KE-1	8028 5854 2870 6942	25 Des 2025	5.900.698.000	5.900.698.000	REVISI DIT PA, Direktif presiden
3.	REVISI KE-2	8028 5854 2870 6942	02 Jan 2026	5.900.698.000	5.900.698.000	REVISI DIT PA
4.	REVISI KE-3	8028 5854 2870 6942	18 Feb 2026	5.900.698.000	5.900.698.000	Revisi Hal 3 Dipa, Revisi POK
5.	REVISI KE-4	8234-1480-0958-3970	09 April 2026	5.900.698.000	11.668.760.000	Revisi DIT PA, penambahan Pagu 51
6.	REVISI KE-5	8234-1480-0958-3970	16 April 2026	11.668.760.000	11.668.760.000	Revisi Hal 3 Dipa, Revisi POK
7.	REVISI KE-6	4109-9076-6051-9900	17 Juni 2026	11.668.760.000	12.102.945.000	Revisi DIT PA, ABT 51 dan 52

DIPA 03 (402020)

NO.	REVISI	DS DIPA	TANGGAL SAH REVISI	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	KETERANGAN
1.	AWAL	5013 5783 7840 0573	24 Nov 2025	133.640.000	-	DIPA AWAL
2.	REVISI KE-1	9188 2404 3404 6403	25 Des 2025	119.216.000	119.216.000	Direktif presiden, REVISI DIT PA
3.	REVISI KE-2	9188 2404 3404 6403	13 Feb 2026	119.216.000	119.216.000	Revisi Hal 3 Dipa
4.	REVISI KE-3	9188-2404-3404-6403	16 April 2026	119.216.000	119.216.000	Revisi Hal 3 Dipa
5.	REVISI KE-4	9188-2404-3404-6403	08 Mei 2026	119.216.000	119.216.000	Revisi Hal 3 Dipa

Koba, 17 Juni 2026

Sekretaris,

The block contains a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Koba (District Court of Koba). The stamp features a central emblem with a star and a shield, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI Koba' and 'KOTA KUBU RAJA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Irhansyah, S.Kom

NIP.198004172009121003

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI KOBA (401912)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653244019121000 | BPG 015 PN KOBA 401912
Periode : 01-06-2026 s/d 30-06-2026

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-03	13:24:32	54930336	0017/SEK.PN.KOBA-401912/VI/2026	22.866.500,00	22.866.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2026-06-04	12:13:20	54977781	From 032901003295305 to 653244019121000 PEMBAYARAN BELANJA BARANG BERUPA PEMBAYARAN HONOR PENGELOLA DIPADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI 260150000019590000001	0,00	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00	SPAN	
2026-06-05	14:12:58	55060115	019/SEK.PN.KOBA-401912/VI/2026	2.732.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2026-06-17	16:21:59	55683598	From 653244019121000 to 653244019121000 SETORAN_65324_4019121000 653244019121000 dari 653244019121000	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	BRIVA	
2026-06-26	15:08:44	56161101	From 653244019121000 to - 0019/SEK.PN.KOBA-401912/VI/2026 transfer ke -	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	INDS	
2026-06-29	09:26:41	56199543	From 032901003295305 to 653244019121000 PENGANTIAN UANG PERSEDIAAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG 260150000023757000001	0,00	0,00	20.303.167,00	20.303.167,00	SPAN	
2026-06-29	14:50:27	56218769	From 653244019121000 to - 0020/SEK.PN.KOBA-401912/VI/2026 transfer ke -	20.303.167,00	20.303.167,00	0,00	0,00	INDS	
			Total Mutasi		49.141.667,00	26.275.167,00			
			Saldo Akhir				0,00		

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 401912 Pengadilan Negeri Koba
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : JURNAL BALIK AWAL TAHUN

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja barang yang dibayar di muka	-	3.680.000
	522141	Belanja Sewa	3.680.000	-

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026
 Operator SAKTI


 NOFRIANDI PRATAMA

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran


 IPRIANSYAH

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 401912 Pengadilan Negeri Koba
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : JURNAL BALIK AWAL TAHUN

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	18.269.851	-
	522111	Belanja Langganan Listrik	-	18.269.851

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026
 Operator SAKTI



NOFRIANDI PRATAMA

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



IRHANSYAH

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 401912 Pengadilan Negeri Koba
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : JURNAL BALIK AWAL TAHUN

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	257.927.611	-
	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	-	257.927.611

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026
 Operator SAKTI



NOFRIANDI PRATAMA

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran



IRHANSYAH

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 401912 Pengadilan Negeri Koba
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 30 Juni 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : JURNAL BALIK AWAL TAHUN

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ dst

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	844.600.000	-
	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-	844.600.000

Direkam Tanggal : 30 Juni 2026

Operator SAKTI



NOFRIANDI PRATAMA

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



KHANSYAH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

JL. GELORA NO. 1 KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANGKA TENGAH

Telp / Fax. (0718) 6911210

Email : pengadilan.negeri.koba@gmail.com Website : www.pn-koba.go.id

Bangka Tengah 33681

KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA
PER 30 JUNI 2026

K/L : (005) Mahkamah Agung RI
BASE1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (3000) Bangka Belitung
Satker : (401912) PN Koba

No	Uraian Belanja	Nilai Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Lama Angsuran (Bulan)	Angsuran Per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Angsuran sampai dengan 30 Juni 2026 (bulan)	Total Angsuran s.d 30 Juni 2026	Sisa Anggaran (Bulan)	Belanja Dibayar Dimuka
1	NIHIL									
	TOTAL	0		0				0		0

Koba, 30 Juni 2026
Sekretaris

R. HANSYAH, S.Kom.
NIP. 198004172009121003

KARTU RINCIAN NILAI UTANG PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PENGADILAN NEGREI KOB
PER 30 JUNI 2026

NO	Kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satler	Tahun Anggaran	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Dokumen Sumber	Keterangan
1	3000	Bangka Belitung	401912	Pengadian Negeri Koba	2026	-	-	-	-	NIHIL

Koba, 30 Juni 2026
Sekretaris

IR. HANSYAH, S.Kom.
NIP.198004172009121003

